

**PENGARUH STRUKTUR KEWENANGAN, KARAKTERISTIK SISTEM  
INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN PERILAKU MANAJER  
TERHADAP KESADARAN AKAN BIAYA (STUDI EMPIRIS PADA  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIAK)**

**Wira Ade Kusuma<sup>1\*</sup>, Kirmizi<sup>2</sup>, dan Restu Agusti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Riau

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Riau

**Abstract:** This research aims to analyze and determine the influence of the authority structure, regional characteristics of financial information systems, and the behavior of managers towards cost consciousness. This research was conducted throughout the Department/ Agency/ Office of Siak . The sample in this study is all SKPD Head (Department/ Agency/ Office of Siak) as budget officers which consists of 15 agency heads, 8 agency heads, 18 head of office and secretariat, 1 head of hospitals and 1 Inspectorate. Furthermore, the financial section for each department, agency, office and secretariat 1, so that the entire sample was 65 people, taken by purposive sampling method . While the analysis of data using multiple regression models. The results of this study stated that formal authority, financial information systems and behaviours of manager in Siak Regency, Riau province has a significant effect on increased of the cost consciousness. While informal authority in Siak Regency, Riau province has no significant effect on the increased of the cost consciousness. The coefficient of determination by Adj  $R^2 = 0.923$  . This means that the cost consciousness in Siak Regency of Riau Province is affected by the independent variable (formal authority, informal authority, financial information systems and manager behavior) are of 93.2 % . While approximately 7.8 % is influenced by other variables.

Keywords: *formal authority , informal authority , financial information systems, manager 's behavior and costs consciousness*

## **PENDAHULUAN**

Saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat terutama dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berbagai ketentuan dan kebijakan pun dilaksanakan untuk mendukung hal tersebut. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan yang kemudian direvisi masing-masing menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Walaupun demikian, hingga saat ini penerapan ketentuan dan kebijakan tersebut masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan karena masih ditemukan banyak kelemahan dalam pelaksanaannya, baik dari kelengkapan regulasi, kesiapan pemerintah daerah, maupun penerimaan masyarakat sendiri.

Begitu juga dengan Kabupaten Siak yang baru berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, dengan umur yang masih sangat muda, pemerintah daerah masih membutuhkan fasilitas sumber daya yang sangat besar untuk menerapkan seluruh ketetapan dan kebijakan yang ada. Dengan demikian, walaupun sistem informasi akuntansi ini telah mulai diterapkan di Kabupaten Siak, namun belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa masalah yang timbul, diantaranya pencatatan akuntansi yang tumpang tindih, khususnya pada akun belanja tidak langsung; struktur pelimpahan wewenang, khususnya pada *middle management* kurang jelas dan terkesan diskriminatif, terjadi benturan wewenang antar SKPD dalam menjalankan fungsinya serta kemampuan kepala (SKPD) yang berada di jajaran Pemerintahan Kabupaten Siak didalam menjalankan fungsi – fungsi manajerial : perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, pemilihan staf, negosiasi dan perwakilan masih relatif kurang baik.

Suatu organisasi perlu merancang desain organisasi untuk mencapai tujuannya. Desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek struktural dan budaya termasuk karakteristik informasi yang dilakukan para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Kesadaran akan biaya merupakan suatu kesadaran tentang sikap seluruh pekerja mengenai pemahaman yang berhubungan dengan biaya, pengendalian biaya, mencegah munculnya biaya yang tidak perlu serta pengurangan biaya (Finkler, 1999). *Cost conscious* tidak selalu harus diartikan pada hal-hal besar yang secara signifikan mempengaruhi terhadap jumlah biaya yang harus perusahaan keluarkan. Sadar biaya juga tidak harus berupa pengurangan biaya yang jika berhasil akan serta merta memperbaiki kinerja perusahaan dalam bentuk operating ratio.

Adapun variabel yang dapat mempengaruhi *cost consciousness* adalah struktur kewenangan, karakteristik sistem informasi keuangan daerah, dan perilaku manajer. Struktur kewenangan adalah pengaturan wewenang atau otoritas dalam organisasi yang menunjukkan kedudukan dan wewenang anggota organisasi yang bersangkutan, sehingga setiap keputusan yang keluar senantiasa dapat diterima oleh anggota (Ibrahim, J, T., 2003). Dalam proses perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh struktur kewenangan informal yang bersumber dari kekuasaan dan pengaruh dominasi koalisi (Cyert dan March, 1963). Kewenangan informal yang diperoleh melalui kekuasaan, kemungkinan mempunyai pengaruh negatif pada kesadaran biaya (Weiner et.al., 1987)). Struktur otoritas informal yang melekat pada diri pimpinan SKPD yang diperoleh dan berasal dari kemampuan (kekuasaan) individualnya dalam mempengaruhi pihak lain, lebih cenderung menghasilkan dampak negatif terhadap tingkat kepedulian cost.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan

keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah mencakup APBD dan realisasi APBD provinsi; kabupaten/ dan kota, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, laporan keuangan perusahaan daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah (Sugianto, 2007).

Menurut Anton et.al, (1988), perilaku didefinisikan sebagai tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan. Perilaku yang diamati dalam organisasi tidak hanya terfokus pada perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan, kerja, kemangkiran, keluar masuknya karyawan, produktifitas, kinerja manusiawi tetapi termasuk juga perilaku manajemen yang mengelola suatu organisasi (Robins, 2001). Ada tiga bentuk perilaku manajerial dalam penggunaan SIKD yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu manajemen keputusan, pengendalian keputusan dan kepedulian akan timbulnya biaya (*cost conciousness*).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kesadaran Akan Biaya (Cost Conciousness)**

Kesadaran akan biaya merupakan suatu kesadaran tentang sikap seluruh pekerja mengenai pemahaman yang berhubungan dengan biaya, pengendalian biaya, mencegah munculnya biaya yang tidak perlu serta pengurangan biaya (Finkler, 1999). Sadar biaya atau *cost concious* tidak selalu harus diartikan pada hal-hal besar yang secara signifikan mempengaruhi jumlah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Sadar biaya juga tidak harus berupa pengurangan biaya, walaupun keberhasilan pengurangan biaya akan mampu memperbaiki kinerja perusahaan dalam bentuk *operating ratio*.

Sadar biaya adalah suatu pembentukan budaya, karena hasil yang akan dicapai tidak untuk saat ini saja, tetapi untuk jangka waktu panjang. Oleh karena sadar biaya adalah gerakan budaya, maka hal ini juga merupakan gerakan moral, sehingga tidak memerlukan adanya contoh kongkrit dari atasan serta tidak perlu memperhatikan atau mempedulikan orang lain. Dengan demikian, diharapkan budaya ini dimulai dari diri sendiri dan akan menjadi contoh bagi orang lain.

### **Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)**

Pengertian sistem informasi menurut Whitten dan Bentley (1998) adalah suatu rencana, data proses dan geografi yang diintegrasikan untuk individu yang membentuk suatu kelompok yang dapat digolongkan ke dalam unit-unit organisasi, seperti departemen-departemen, bagian dan kelompok kerja. Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumberdaya, seperti manusia dan

peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi dan selanjutnya informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambil keputusan (Bodnar dan Hpwood, 1998). Sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah disebut sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah mencakup APBD dan realisasi APBD provinsi; kabupaten/ dan kota, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, laporan keuangan perusahaan daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah (Sugianto, 2007).

### **Struktur Kewenangan**

Struktur kewenangan adalah pengaturan wewenang atau otoritas dalam organisasi yang menunjukkan kedudukan dan wewenang anggota organisasi yang bersangkutan, sehingga setiap keputusan yang keluar senantiasa dapat diterima oleh anggota (Ibrahim, J, T., 2003). Struktur kewenangan organisasi dalam penelitian ini dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu struktur kewenangan formal dan struktur kewenangan informal. Struktur kewenangan formal didefinisikan sebagai suatu pilihan yang sengaja diambil manajemen puncak untuk mendelegasikan tipe keputusan ke manajemen tingkat yang lebih rendah. Struktur organisasi biasanya menunjukkan kewenangan formal terkait dengan sistem pertanggungjawaban, pengaruh dan pengendalian yang didasarkan pada prinsip hirarki kewenangan. Dengan kata lain, kewenangan formal berhubungan dengan keputusan yang benar dan berhubungan dengan posisi pimpinan dalam mengatur struktur hirarki (Barnard, 1968). Sedangkan struktur kewenangan informal dapat dilihat dari pengaruh mereka pada pengambilan keputusan strategis. Pada kewenangan informal, manajer sering menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya tanpa adanya sanksi apapun.

### **Perilaku Manajerial**

Menurut Anton et.al, (1988), perilaku didefinisikan sebagai tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan. Perilaku yang diamati dalam organisasi tidak hanya terfokus pada perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan, kerja, kemangkiran, keluar masuknya karyawan, produktifitas, kinerja manusiawi tetapi termasuk juga perilaku manajemen yang mengelola suatu organisasi (Robins, 2001). Ada tiga bentuk perilaku manajerial dalam penggunaan SIKD yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu manajemen keputusan, pengendalian keputusan dan kepedulian akan timbulnya biaya (*cost conciousness*).

## KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### Pengaruh Struktur Kewenangan Terhadap Kesadaran Akan Biaya

Kesadaran akan biaya dapat dinilai melalui kepedulian manajer terhadap biaya. Biaya dijadikan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan dan upaya manajer memperketat biaya untuk mencapai anggaran atau efisiensi biaya (Birnberg et al., 1990). Berkaitan dengan struktur kewenangan dan kesadaran akan biaya terdapat dua hubungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang terjadi melalui SIA. Kepedulian cost (kesadaran akan biaya) merupakan indikator terpenting mengingat bahwa selama ini birokrasi di pemerintah daerah merupakan proses manajemen yang menghasilkan cost tidak efisien dan efektif, bahkan cenderung memunculkan praktek-praktek tidak sehat seperti korupsi. Kepedulian cost dapat digunakan untuk mengukur kinerja pimpinan SKPD dalam hal penilaian keefektifan dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan rutin kantor. Kinerja pimpinan yang baik dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pendelagasian wewenang. Individu yang menerima pendelegasian wewenang tersebut akan memiliki hak keputusan formal.

Kepala dan pimpinan SKPD dijamin hak keputusannya atas penyusunan dan penetapan DPA (Daftar Pengisian Anggaran) SKPD yang dituangkan dalam formulir yang disebut DPA (Daftar Pengisian Anggaran). Karenanya mereka menjadi lebih perhatian dan peduli untuk memonitor dan mengontrol *costs* yang direalisasi atas APBD. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Syafruddin (2006). Atas dasar uraian ini dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut : Hipotesis 1: Struktur kewenangan formal berpengaruh positif terhadap kesadaran akan biaya.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa otoritas informal adalah kemampuan individu untuk memengaruhi keputusan dan kegiatan organisasi (Alexander & Morlock, 2000; Kotter, 1985). Fokus penelitian ini terletak pada otoritas informal yang ada pada kepala dan pimpinan SKPD. Pada saat ini, mereka merupakan kelompok koalisi dominan dalam SKPD yang menentukan efektifitas dan efisiensi unit kerja tersebut. Sesuai dengan aturan yang ada, kekuasaan mereka terletak pada kemampuan mereka untuk mengontrol perumusan dan penentuan DPA (Daftar Pengisian Anggaran) dan kemampuan mereka dalam memahami situasi dan kondisi detail yang ada dalam SKPD.

Otoritas informal SKPD dimanifestasikan dalam kontrol signifikan mereka terhadap sumberdaya, meskipun mungkin secara formal hal ini tidak memungkinkan. Sering kali pimpinan SKPD menggunakan otoritas informal ini dengan mengabaikan pertimbangan kepala daerah. Ini sangat mungkin terjadi sebab kepala daerah hanya mempunyai pengetahuan yang terbatas atas situasi dan kondisi masing-masing SKPD. Selain itu, situasi dan kondisi struktur otoritas informal ini sangat memungkinkan pimpinan SKPD untuk menentukan,

merumuskan, mengelola, dan mengevaluasi keputusan strategik SKPD tanpa pertimbangan kepala daerah.

Jika melihat (observasi) empiris dapat dinyatakan bahwa pimpinan SKPD yang di dalam dirinya melekat otoritas informal cenderung untuk tidak berkesimpulan bahwa informasi yang disediakan oleh SIKD merupakan informasi relevan bagi pembuatan atau manajemen keputusan yang mereka ambil. Ini terjadi karena pemahaman mereka tentang peran akuntansi dalam perumusan dan pembuatan keputusan tidak begitu optimal. Atas dasar uraian ini, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut : Hipotesis 2: Struktur kewenangan informal berpengaruh negatif terhadap kesadaran akan biaya.

### **Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kesadaran akan biaya**

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan dan pengendalian. Menurut Baiman dan Demski (1980) informasi dalam suatu organisasi mempunyai dua peranan yaitu *a decision-facilitating role* dan *a decision influencing (control) role*. Ketika proses pengambilan keputusan dan pengendalian dilihat secara terpisah, berdasarkan teori pengambilan keputusan dan teori agency menyebutkan bahwa *more public information* adalah lebih baik dibandingkan *less public information*. Oleh karena itu sering dilakukan interaksi antara keputusan dan pengendalian.

Relevansi merupakan salah satu karakteristik informasi yang harus dimiliki oleh informasi keuangan daerah. Dalam penelitian ini, karakteristik sistem informasi keuangan daerah diasumsikan merupakan kriteria penting bagi pimpinan SKPD dalam membuat keputusan dan mengontrol keputusan. Argumentasi yang mendasari asumsi tersebut adalah bahwa ketika pimpinan SKPD mempersepsikan bahwa informasi yang disediakan oleh sistem informasi keuangan daerah merupakan informasi yang relevan, tepat waktu, akurat dan formatnya baik, maka informasi tersebut akan digunakan dalam pengelolaan SKPD termasuk pembuatan keputusan dan kontrol keputusan. Atas dasar uraian ini, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut : Hipotesis 3: Karakteristik sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesadaran akan biaya.

### **Pengaruh Perilaku Manajer Terhadap Kesadaran Akan Biaya**

Kekuasaan berpengaruh pada penggunaan SIA oleh manajemen puncak untuk mengendalikan perilaku. Hal ini disebabkan kekuasaan memberikan kewenangan informal untuk membuat keputusan strategi yang memungkinkan mereka menghindari usaha manajer puncak untuk menggunakan SIA dalam mengendalikan perilaku mereka (Young dan Saltman, 1985). Menurut Abernethy dan Stoelwinder (1995) bahwa manajer dengan kekuasaannya akan menentang usaha manajemen puncak untuk menerapkan sistem administrasi.

Abernethy dan Stoelwinder (1991), menyatakan bahwa manajer dengan kekuasaannya tidak memandang informasi yang disajikan oleh sistem akuntansi adalah relevan untuk pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan keengganan mereka untuk menjalankan peran managerial tersebut karena isu kepemimpinan dalam organisasi lebih utama dibandingkan dengan isu sumber daya manajemen. Ketidakterdapatnya orientasi managerial akan berpengaruh negatif dengan penggunaan SIA untuk pengendalian keputusan dan manajemen keputusan. Atas dasar uraian ini dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut: Hipotesis 4: Perilaku manajer berpengaruh positif terhadap kesadaran akan biaya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah Kepala SKPD dan SKPKD (Dinas/ Badan/ Kantor) Pemerintah Kabupaten Siak dan Bagian Keuangan (Kabag/ Kasubag/Kasi dan Kasubsi). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran yang berjumlah orang yang terdiri dari 15 orang kepala dinas, 8 orang kepala badan, 18 orang kepala kantor dan sekretariat, RSUD dan inspektorat 1 orang. Selanjutnya bagian Keuangan untuk masing-masing dinas, badan, kantor dan sekretariat diambil 1 orang yang merupakan (Kabag/ Kasubag/Kasi dan Kasubsi) Keuangan, sehingga seluruh sampel berjumlah 65 orang menggunakan metode *purposive sampling*. Pertimbangan dalam pemilihan sampel tersebut karena Kepala SKPD memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) dimana mereka terlibat mulai dari merencanakan sampai pelaksanaan anggaran, yang memungkinkan akan berpengaruh terhadap sikap mereka terhadap biaya yang mungkin akan timbul.

### **Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data penelitian ini adalah data primer yang berasal dari jawaban responden atas beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti melalui wawancara, kuesioner dan data sekunder yang didapat secara langsung oleh peneliti dari literatur, studi pustaka, jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian dalam penelitian ini. Butir-butir pernyataan yang ada dalam kuesioner diadopsi dari penelitian Atarwaman (2008) dan Chairina (2006).

### **Teknik Analisis Data**

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa regresi berganda dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) (Ghozali, 161 : 2009). Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan metode statistik regresi berganda (*multiple regression*) dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

a	: Konstanta
Y	: Kesadaran akan biaya
X <sub>1</sub>	: Struktur Kewenangan formal
X <sub>2</sub>	: Struktur Kewenangan Informal
X <sub>3</sub>	: Karakteristik sistem informasi keuangan
X <sub>4</sub>	: Perilaku manajer
b <sub>1</sub> , b <sub>2</sub> , b <sub>3</sub> , b <sub>4</sub>	: Koefisien regresi
e	: <i>error</i>

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan *goodness of fit*-nya. Secara statistik, dapat diukur dari uji F dan koefisien determinasinya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas responden didapat secara langsung di lapangan, dimana responden ini terdiri dari kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran yang berjumlah 15 orang kepala dinas, 8 orang kepala badan, 18 orang kepala kantor dan sekretariat, RSUD dan inspektorat, masing-masing 1 orang. Selanjutnya satu orang bagian Keuangan untuk masing-masing dinas, badan, kantor dan sekretariat yang merupakan (Kabag/ Kasubag/Kasi dan Kasubsi) Keuangan, sehingga seluruh sampel berjumlah 65 orang. Kemudian dilakukan penyebaran kuisioner keseluruhan responden dan yang mengisi lengkap dan dapat digunakan untuk pengolahan data hanya 61 orang, sementara sisanya 4 orang tidak dapat diolah datanya karena kuisioner yang diisi tidak lengkap.

### Deskripsi Penelitian

Profil responden terbentuk dari hasil tabulasi data yang dikumpulkan dan disusun menjadi data yang lebih terstruktur. Dari 61 responden yang berpartisipasi sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 37 orang (60,70%), sebagian besar berusia diantara 31-40 tahun sebanyak 51 orang (48.6%), mayoritas tingkat pendidikan responden adalah sarjana (S1) yaitu sebanyak 33 orang (54,10%).

### Pengujian Data

Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS menunjukkan nilai *coeficient correlation pearson* pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel uji validitas. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari angka kritik ( $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ ), maka instrumen tersebut dikatakan valid. Angka kritik pada penelitian ini adalah  $N-2$  ( $N = \text{jumlah sampel}$ ) =  $61-2 = 59$  dengan taraf signifikan 5%. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1 : Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian**

Variabel	Nomor Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Sistem Informasi Akuntansi	1	0,787	0,198	Valid
	2	0,780	0,198	Valid
	3	0,816	0,198	Valid
	4	0,762	0,198	Valid
	5	0,597	0,198	Valid
	6	0,797	0,198	Valid
	7	0,679	0,198	Valid
Kewenangan Formal	1	0,753	0,198	Valid
	2	0,333	0,198	Valid
	3	0,327	0,198	Valid
	4	0,427	0,198	Valid
	5	0,378	0,198	Valid
	6	0,575	0,198	Valid
Kewenangan Informal	1	0,683	0,198	Valid
	2	0,773	0,198	Valid
	3	0,694	0,198	Valid
	4	0,579	0,198	Valid
	5	0,797	0,198	Valid
Sistem Informasi Keuangan	1	0,362	0,198	Valid
	2	0,561	0,198	Valid
	3	0,573	0,198	Valid
	4	0,573	0,198	Valid
	5	0,427	0,198	Valid
	6	0,378	0,198	Valid
Perilaku Manajer	1	0,787	0,198	Valid
	2	0,780	0,198	Valid
	3	0,816	0,198	Valid
	4	0,773	0,198	Valid
	5	0,717	0,198	Valid
	6	0,626	0,198	Valid
	7	0,573	0,198	Valid

Hasil uji realibilitas dengan *cronbach alpha* menunjukkan data dapat diandalkan. Sedangkan, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil pengujian normalitas menunjukkan grafik normal plot model regresi titik-titik menyebar disekitar diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal dan grafik normal plot tersebut membentuk garis lurus dari sisi kiri bawah kekanan atas sesuai dengan teori linearitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa linearitas dalam model regresi ini sudah dipenuhi

Pengujian linearitas menggunakan uji durbin watson. Hasil pengujian menunjukkan masing-masing model regresi sebesar 1.149 dan dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi yang dibuat.

### **Pengujian Hipotesis**

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa F hitung variabel independen (kewenangan formal, kewenangan informal, sistem akuntansi keuangan dan perilaku manajer) dengan variabel kesadaran biaya adalah 179,717

dan F tabel adalah 2,537 sehingga diperoleh kesimpulan F hitung  $>$  F tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti model regresi penelitian ini telah memenuhi kelayakan model regresi untuk diteruskan.

Tingkat koefisien determinasi yang dimiliki sebesar  $Adj R^2 = 0,923$ . Hal ini berarti kesadaran akan biaya di kabupaten Siak provinsi Riau dipengaruhi oleh variabel independen (kewenangan formal, kewenangan informal, sistem akuntansi keuangan dan perilaku manajer) sebesar 92,30%. Sementara sekitar 7,70% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Hipotesis 1

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung variabel kewenangan formal adalah 2,798 dan t tabel adalah 2,003 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung  $>$  t tabel dan  $P \text{ value} < \alpha$ , maka  $H_1$  diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,008 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti kewenangan formal memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran biaya. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_1$ ) dapat dibuktikan.

Diterimanya hipotesis ini disebabkan karena adanya peningkatan pada kewenangan formal yang akan diikuti dengan peningkatan atas kesadaran akan biaya. Hal ini juga berarti bahwa responden memandang bahwa kewenangan formal yang diterapkan di masing-masing SKPD memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kesadaran akan biaya di masing-masing SKPD tersebut.

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kewenangan formal memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran akan biaya. Perubahan atau peningkatan kewenangan formal akan diikuti dengan peningkatan kesadaran akan biaya. Kewenangan formal berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan biaya di masing-masing SKPD di kabupaten Siak Provinsi Riau.

### Hasil Uji Hipotesis 2

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung variabel kewenangan informal adalah 1,368 dan t tabel adalah 2,003 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung  $<$  t tabel dan  $P \text{ value} > \alpha$ , maka  $H_2$  ditolak. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,213 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti kewenangan informal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran akan biaya. Dengan demikian hipotesis kedua ( $H_2$ ) tidak dapat dibuktikan.

Ditolaknya hipotesis ini disebabkan peningkatan pada kewenangan informal tidak akan diikuti dengan peningkatan atas kesadaran akan biaya. Hal ini juga berarti bahwa responden memandang bahwa kewenangan informal yang diterapkan di masing-masing SKPD tidak memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kesadaran akan biaya di masing-masing SKPD tersebut.

Variabel kewenangan informal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran akan biaya. Perubahan atau peningkatan kewenangan informal tidak akan mempengaruhi peningkatan kesadaran akan biaya. Kewenangan informal kurang berperan dalam meningkatkan kesadaran akan biaya di masing-masing SKPD di kabupaten Siak Provinsi Riau.

### Hasil Uji Hipotesis 3

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa  $t$  hitung variabel sistem informasi keuangan adalah 2,486 dan  $t$  tabel adalah 2,003 sehingga diperoleh kesimpulan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel dan  $P$  value  $<$   $\alpha$ , maka  $H_3$  diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,022 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti sistem informasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran akan biaya. Dengan demikian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) dapat dibuktikan.

Variabel sistem informasi keuangan daerah (SIKD) memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran akan biaya. Perubahan atau peningkatan sistem informasi keuangan akan mempengaruhi peningkatan kesadaran akan biaya. Sistem informasi keuangan sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran akan biaya di masing-masing SKPD di kabupaten Siak Provinsi Riau.

Berkaitan dengan struktur kewenangan dan kesadaran akan biaya terdapat dua hubungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang terjadi melalui sistem informasi keuangan. Penggunaan sistem informasi keuangan akan meningkatkan pentingnya kesadaran akan biaya bagi para manajer. Tujuan sistem informasi keuangan tersebut dapat memperkuat pentingnya sumber daya manajemen dan konsekuensi biaya dari pengambilan keputusan.

### Hasil Uji Hipotesis 4

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa  $t$  hitung variabel sistem informasi keuangan adalah 3,295 dan  $t$  tabel adalah 2,003 sehingga diperoleh kesimpulan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel dan  $P$  value  $<$   $\alpha$ , maka  $H_4$  diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti perilaku manajermemiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran akan biaya. Dengan demikian hipotesis keempat ( $H_4$ ) dapat dibuktikan.

Diterimanya hipotesis ini disebabkan peningkatan pada perilaku manajer akan diikuti dengan peningkatan atas kesadaran akan biaya. Hal ini juga berarti bahwa responden memandang bahwa perilaku manajer di masing-masing SKPD memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kesadaran akan biaya di masing-masing SKPD tersebut.

Kesadaran akan biaya dapat dinilai melalui kepedulian manajer terhadap biaya. Biaya dijadikan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan dan upaya manajer memperketat biaya untuk mencapai anggaran atau efisiensi biaya. Kekuasaan berpengaruh pada penggunaan SIA oleh manajemen

puncak untuk mengendalikan perilaku. Hal ini disebabkan kekuasaan memberikan kewenangan untuk membuat keputusan strategis yang memungkinkan mereka menghindari usaha manajer puncak untuk mengendalikan perilaku mereka.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan formal di kabupaten Siak provinsi Riau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran akan biaya pada aparat SKPD dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008. Artinya untuk menerapkan kesadaran biaya di masing-masing SKPD perlu adanya penerapan kewenangan formal yang tepat.
2. Kewenangan informal di kabupaten Siak provinsi Riau tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran akan biaya pada aparat SKPD dengan tingkat signifikansi sebesar 0,213. Artinya kewenangan informail tidak ada kaitannya dengan penerapan kesadaran biaya di masing-masing SKPD.
3. Sistem informasi keuangan di kabupaten Siak provinsi Riau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran akan biaya pada aparat SKPD dengan tingkat signifikansi sebesar 0,022. Artinya semakin baik penerapan sistem informasi keuangan maka akan semakin baik pula kesadaran biaya aparat di masing-masing SKPD.
4. Perilaku manajer di kabupaten Siak provinsi Riau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran akan biaya pada aparat SKPD dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Artinya semakin baik perilaku manajer (pimpinan) maka akan semakin baik pula kesadaran biaya aparat di masing-masing SKPD.
5. Tingkat koefisien determinasi yang dimiliki sebesar  $Adj R^2 = 0,923$ . Hal ini berarti kesadaran akan biaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau dipengaruhi oleh variabel independen (kewenangan formal, kewenangan informal, sistem informasi akuntansi dan perilaku manajer) sebesar 93,2%. Sementara sekitar 7,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, antara lain :

1. Dalam penelitian ini, penggunaan kuisioner sebagian besar masih menggunakan kuisioner yang dipakai peneliti sebelumnya, sehingga kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pengukurannya karena belum tentu menggambarkan keadaan yang sama pada objek peneliti sebelumnya.
2. Karena memiliki banyak kesibukan dan keterbatasan waktu, responden meminta kuisionernya ditinggalkan yang berdampak pada peneliti tidak bisa mendampingi responden pada saat menjawab. Akibatnya jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

### **Saran**

1. Bagi aparat Pemda harus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka mengenai sistim informasi akuntansi. Pemerintah daerah juga hendaknya menempatkan aparat yang memiliki latar belakang ilmu di bidang akuntansi agar aparatur yang bekerja di bidang keuangan dapat memahami laporan akuntansi internal, dalam upaya mengelola pemerintahan yang lebih efektif.
2. Sebaiknya perilaku pimpinan SKPD juga ditingkatkan agar pemahaman mereka tentang kesadaran akan biaya dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan menggunakan variabel lainnya yang berkaitan dengan masalah pengawasan keuangan daerah maupun menggunakan model estimasi lain.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atarwan. J. D. Rita. 2008, *Pengaruh Struktur Kewenangan, Karakteristik Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Perilaku Manajer Terhadap Kesadaran akan Biaya*. Tesis S2, UNDIP, tidak dipublikasikan.
- Chairina, 2007, "Pengaruh Kekuasaan Dan Desain Organisasi Terhadap Perilaku Manajer". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vo. 22, No. 3, 319-342
- Depdagri RI, 2007, *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008*, Permendari No. 30 1997.
- Endang, R., 2004, *Analisis Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan dan Kultur Organiasional Sebagai Variabel Moderating Terhadap Hubungan Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajer*. Thesis Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro (Tidak dipublikasikan)
- Ferdinand, Augusty Tae, 2006, *Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

- Ghozali, I., 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hansen, Don R. dan M.M. Mowen, 2000, *Management Accounting*. 5 th Edition Sount-Western College Publishing.
- Haryanto dkk, 2007, *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama*. Universitas Diponegoro.
- Ibrahim, J, T., 2003, “*Sosiologi Pedesaan*”, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Khomsiyah & Nur Indriantoro. 2000. *Aspek Perilaku Penganggaran Partisipatif*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indo. Vol 3 No. 2 Des. Pp. 123-133
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Puspaningsih, 2004, *Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Manajer Perusahaan Manufaktur*, JAAI Volume 8 No.1, Juni 2004.
- Sugianto, 2007, “*Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*”, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Surya Dharma, 2005, *Manajemen Kinerja; falsafah Teori dan Penerapannya*, Cetakan I, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wibowo, 2007, *Manajemen Kinerja*, Edisi Dua, Penerbit PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Wiryo dan Raharjo, 2007, *Pengaruh Karakteristik Personalitas Manajer Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Dengan Kinerja Manajerial*, Vol 11, No.1, Th 2007: Hal 50-63.